



JEP

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 – 9595
Volume 7 No 1 April 2018

Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan
Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi
Di Pulau Sumatera
Hendra Prastya, Toto Gunarto, Arivina Ratih

Pengaruh Sosial Demografi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Di Industri Meubel Kota Denpasar
**Surya Dewi Rustariyuni, Luh Putu Aswitari, Nashahta Ardhiaty
Nurfiat, Kadek Nia Paramita Dewi**

Telaah Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Propinsi
Lampung : Sebuah Eksplorasi dengan Data Input-Output
Zulfa Emalia

Early Warning Indicator Krisis Nilai Tukar Pada
Perekonomian Indonesia
Anto Kurniawan, Nurbetty Herlina Sitorus

Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota
Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi
Daerah Periode 2000-2008
Imam Awaludin

Dampak Upah Minimum Di Pasar Tenaga Kerja
Industri Pengolahan Provinsi Lampung
Ida Budiarty

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA

Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2008

Imam Awaludin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2000-2008. Data yang digunakan berupa data *time series* dari tahun 2000 – 2008. Analisis data menggunakan metode perhitungan rasio yang meliputi: (1) mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF), (3) mengukur besarnya Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD, (4) menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR), (5) Menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap dana dari pusat dalam membiayai belanja daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan PAD kota Bandar Lampung masuk dalam kategori *cukup*. DOF Kota Bandar Lampung masuk dalam kategori *kurang*. RDAU menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung telah mampu mengurangi penyaluran dana alokasi umum dari pemerintah pusat namun masih termasuk kategori *sangat kurang*. IKR dinyatakan masuk dalam kategori *sangat baik*. Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung dalam mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih intensif melalui penggalian potensi sumber PAD Bandar Lampung agar mampu meningkatkan PAD dan TPD serta melaksana otonomi daerah yang loas nyata dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : *DOF, IKR, PAD, RDAU, Rasio ketergantungan.*

Pendahuluan

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dilihat dari aspek administrasi maupun dilihat dari aspek keuangannya. Hal ini ditandai dengan adanya pergeseran peran

pemerintah pusat dari posisi sentral (*sentralistik*) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada daerah (*desentralistik*). Hal ini dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Artinya, daerah sudah diberi kewenangan sepenuhnya untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, di satu sisi dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kaho (1997) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan otonomi daerah, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, faktor manusia sebagai pelaksana, *kedua*, faktor keuangan, *ketiga*, faktor peralatan dan *keempat*, faktor organisasi

dan manajemen. Keempat faktor inilah yang sangat menentukan prospek otonomi daerah di masa yang akan datang.

Sejalan dengan itu, untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau kegiatan pemerintahan, faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pamudji (1982) menyatakan bahwa keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Pada kenyataannya permasalahan yang dihadapi daerah sekarang adalah kondisi ekonomi yang berbeda antar daerah. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan harapan yang besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Salah satu sumber dana pemerintah daerah yang terpenting dan potensial

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan terus meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami hal yang sama dengan kabupaten dan kota yang lain. Berdasarkan data Departemen Keuangan RI, selama lima tahun terakhir rata-rata sumbangan pemerintah pusat terhadap penerimaan daerah Kota Bandar Lampung mencapai 67% dari total penerimaan. Bahkan dari tahun ke tahun jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kota Bandar Lampung cenderung semakin meningkat.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa bantuan pemerintah

pusat terhadap Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagaimana yang diamanatkan didalam undang-undang. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan Kota Bandar Lampung ini adalah rendahnya kemampuan penerimaan PAD, meskipun potensi untuk memacu peningkatannya masih cukup luas. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 dan 35 tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah,

Tabel.1. Persentase DAU terhadap Total Penerimaan Kota Bandar Lampung Tahun 2000 - 2006

Tahun	Total Penerimaan (Dlm Juta Rupiah)	DAU (Dlm Juta Rupiah)	Rasio (%)
2000	83.828,27	44.666,43	53,28
2001	231.198,87	199.350,00	86,22
2002	369.344,39	233.550,00	63,23
2004	368.985,45	243.044,00	65,87
2005	411.681,66	264.151,00	64,16
2006	567.594,51	421.911,00	74,33
Rata-rata			67,84

Sumber: WWW.Depkeu.go.id

Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2008

sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah : rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 1995). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama tujuh tahun terakhir (2001-2007)

mengalami pertumbuhan yang terus meningkat.

Berdasarkan harga konstan (tahun 2000) kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2007 tersebut disumbang oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 19,42%, sedangkan pertambangan dan penggalian sebesar -1,57%. Unit-unit ekonomi yang menyumbangkan pertumbuhan PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan harga konstan 2000 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2. Sektor-sektor Ekonomi dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2000-2007 (%)

Lapangan usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Petani, Peternak,perikanan	13,35	-14,27	1,95	0,27	4,46	0,10	9,99	2,04
Pertambangan & penggalian	11,35	4,38	0,83	1,60	6,91	-4,21	-4,79	-1,57
Ind. pengolahan tanpa migas	5,18	2,24	0,98	-1,07	5,62	6,94	15,08	10,47
Listrik &air bersih	6,45	23,15	-4,65	-1,74	1,77	1,44	-14,30	3,07
Bangunan	3,85	2,81	1,14	4,10	2,16	1,21	1,06	1,16
Perdagangan, hotel, restoran	3,77	2,15	0,92	10,41	4,36	2,18	0,32	2,67
Pengangkutan&komunikasi	7,87	9,34	7,59	8,28	9,44	7,07	3,91	5,00
Kew,persewaan&jasa perush.	-14,73	-6,75	16,82	27,00	32,16	14,32	16,11	19,42
Jasa-jasa	2,65	3,59	3,72	3,12	0,53	1,44	1,51	2,18
PDRB	3,29	3,14	3,82	6,96	7,68	5,03	6,30	6,95

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2008

Tabel. 3. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Perkapita 2000-2007

Tahun	PDRB Harga Berlaku (jt)	PDRB Harga Konstan (jt)	Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (Rp)	
				Harga berlaku	Harga Konstan
2000	4.908.421	1.695.000	743.109	6.605.250	2.280.957
2001	5.361.475	1.748.563	754.847	7.102.731	2.316.447
2002	6.001.848	1.815.272	767.036	7.824.779	2.366.606
2003	6.655.848	1.941.578	779.179	8.542.130	2.491.825
2004	6.088.382	4.549.463	800.490	7.605.819	5.683.348
2005	6.795.637	4.778.188	809.860	8.391.125	5.900.017
2006	8.378.439	5.079.047	803.922	10.421.955	6.317.835
2007	10.450.733	5.432.246	812.133	12.868.253	6.688.862

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2008

Dengan demikian, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung secara riil semakin menunjukkan peningkatan yang terus membaik. Seperti yang terlihat pada Tabel 3

Bila dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku adalah sebagai berikut : Pada tahun 2004 sebesar Rp 6.088.382,- meningkat menjadi Rp 6.795.637,- pada tahun 2005. Sedangkan PDRB Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan (tahun 2000) pada Tahun 2004 sebesar Rp 4.549.463,- meningkat menjadi Rp 4.778.188,- pada tahun 2005.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat di satu sisi amanat undang-undang otonomi daerah menghendaki adanya kemandirian

daerah terutama dari aspek keuangan. Disisi lain terlihat bahwa bantuan pemerintah pusat kepada daerah terutama Kota Bandar Lampung cenderung semakin meningkat. Peningkatan bantuan pemerintah pusat ini telah pula mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung yang juga hampir setiap tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam merespon pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu tulisan ini berjudul : “Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000 - 2008”

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2000 – 2008 ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2000-2008. Hipotesis yang diajukan dalam tulisan ini adalah : Diduga tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung masih relatif rendah dibanding dengan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

Kajian Pustaka

Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan teori Rostow, pada saat ini negara Indonesia termasuk dalam tahap tinggal landas. Untuk mencapai tahapan selanjutnya, maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Secara umum asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dibedakan menjadi

asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Otonomi Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Menurut Utomo (2000), seluruh khasanah politik dan pemerintahan

di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal yang harus menitik beratkan adanya kewenangan. Dengan kewenangan yang dimiliki, akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi

negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.

- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Ukuran Keberhasilan Otonomi Daerah

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor

keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. *Pertama*, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. *Kedua*, keuangan sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. *Ketiga*, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. *Keempat*, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena

adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Mamesah (1995) mengemukakan bahwa keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah. Anggaran tersebut menggambarkan rincian kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan dalam rupiah untuk suatu periode tertentu dan merupakan penjabaran dari GBHN dan Repelita. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sering juga disebut sebagai anggaran daerah, ialah anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang meliputi

anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dengan masing-masing ada sisi pendapatan dan sisi belanja.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho,1998).

Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah

Derajat otonomi fiskal daerah akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD-nya, seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dalam pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya (Radianto, 1997).

Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian Cahyo W. Darman dengan judul Upaya Mengurangi Ketimpangan Fiskal Antar Daerah. Menurut Cahyo sektor pertanian dan industri pengolahan serta pertambangan dan galian merupakan sektor yang paling besar dalam memberikan pengaruh terhadap PDRB di tiap daerah. Salah satu ciri strategis pembangunan yang harus dimiliki oleh negara yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian adalah kebijakan pembangunan yang menjaga keterkaitan antar sektor pertanian dengan sektor industri. Kaitan yang paling sesuai adalah pengolahan produk-produk sektor pertanian ke dalam pengembangan agro industri.

Dalam penelitiannya, Sjafrizal mengambil judul Analisis Tinjauan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menganalisis pengaruh PAD terhadap pengeluaran daerah tingkat II selama periode sebelum otonomi daerah dan menyongsong pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memberi sumbangan yang cukup besar terhadap PAD dibanding sumber pendapatan daerah dari retribusi yang selalu berfluktuasi. Bila dilihat dari peningkatan PAD memang cukup baik, tetapi PAD ini masih selalu lebih kecil dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Hal ini berarti daerah Sleman selama ini masih sangat tergantung dari subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) dalam bentuk tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Besarnya PAD pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2000-2008
2. Besarnya PDRB pemerintah daerah Kota Bandar Lampung tahun 2000 -2008
3. Besarnya bantuan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung 2000-2008

Sumber data diperoleh dari :

1. Bappeda Kota Bandar Lampung berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung periode tahun anggaran 2000 sampai dengan 2008.
2. Biro Pusat Statistik tahun 2008 berupa data-data mengenai keadaan umum daerah Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, data Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2000-2008 yang dipergunakan untuk menghitung rasio keuangan daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu realisasi penerimaan asli daerah antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Total Penerimaan Daerah (TPD), yaitu seluruh realisasi penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan, bantuan, penerimaan lain-lain dan pinjaman daerah.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi atau transfer dana dari pusat kepada daerah otonom dalam bentuk blok yang diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintahan daerah.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu membiayai berbagai macam kebutuhan khusus daerah dan menanggulangi keadaan yang mendesak.
5. Bagi Hasil Pajak, meliputi PBB/PKB/BBNKB, dan Bagi Hasil Bukan Pajak antara pemerintah pusat dan daerah.
6. Belanja Rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literatur yang

meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta buku-buku tentang keuangan daerah dan otonomi daerah.

2. Studi Lapangan

Observasi

Mengadakan tinjauan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mengamati, meneliti dan mempelajari tentang data-data sekunder dari Bapeda Kota Bandar Lampung dan BPS.

Dokumentasi

Pencatatan, pengumpulan dan pengelompokan data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data sekunder.

Analisis Data

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis rasio keuangan daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung didalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar bagi operasionalisasi variabel yang di ukur sebagaimana akan

dikemukakan dalam penelitian ini.

3. Menghitung dan menyajikan hasil analisis data yang berupa rasio-rasio keuangan daerah.
4. Menarik kesimpulan atas rangkaian analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga diketahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah :

Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan TPD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan.

$$\mathbf{TPPADt} = \frac{PADt - PADt - 1}{PADt - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

TP PADt= Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt-1= Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

$$\mathbf{TTPD}t = \frac{TPDt - TPDt - 1}{TPDt - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

TP TPDt = Tingkat pertumbuhan APBD tahun berjalan

TPDt = APBD tahun berjalan

TPDt-1 = APBD tahun sebelumnya

Mengukur Derajat otonomi Fiskal (DOF) Kota Bandar Lampung (Depdagri,1991)

$$\mathbf{DOF} = \frac{PADt}{TDPt} \times 100\%$$

Keterangan :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun t

Mengukur besarnya Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD Kota Bandar Lampung.

$$\mathbf{RDAU} = \frac{DAU}{APBD} \times 100\%$$

Keterangan :

RDAU = Rasio Dana Alokasi Umum

DAU = Dana Alokasi Umum

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Bandar Lampung untuk mengukur kontribusi PAD

Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2008

terhadap belanja rutin dan pembangunan.

$$IKR = \frac{PADt + DAU + BagiHasil}{BelanjaRutin} \times 100\%$$

Keterangan :

PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun tertentu

DAU = Dana Alokasi Umum

Bagi Hasil = Bagi hasil bukan pajak

Belanja Rutin = Belanja Rutin Dalam APBD

Menghitung Rasio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat dalam membiayai belanja daerah (Depdagri, 1991)

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{DAU + DAK + Bantuan}{APBD} \times 100\%$$

Langkah pengambilan keputusan hipotesis penelitian dilakukan dengan menetapkan kategori sebagai berikut :

Perubahan (%)	PAD / TPD / DOF / IKR	RDAU / RK
< 10,00	Sangat kurang	Sangat baik
10,01 - 20,00	Kurang	Baik
20,01 - 30,00	Cukup	Sedang
30,01 - 40,00	Sedang	Cukup
40,01 - 40,00	Baik	Kurang
> 50,01	Sangat baik	Sangat kurang

Sumber: Depdagri, 1991

Hasil dan Pembahasan

Hasil Perolehan Data

Secara keseluruhan, hasil perolehan data yang berasal dari proses observasi dan dokumentasi secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.:

Hasil perolehan data tersebut di atas digunakan untuk menghitung rasio keuangan daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2000-2007 untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah

Table 4. Data Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2000 –2007 (juta rupiah)

No	Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	PAD	11.922,34	23696,67	31586,28	35511,80	36689,58	46.073,50	48.397,04	49.796,00
2	TPD	83.828,27	231198,87	296008,08	369344,39	368985,45	411.681,66	567.594,51	636.339,00
3	Bagi Hasil BP	7.357,07	13497,65	16252,09	16249,77	0,00	24.440,18	36.148,47	60.126,00
4	DAU	44.666,43	159411,80	139350,00	233550,00	243044,00	264.151,00	421.911,00	464.191,00
5	DAK	16.793,14	679,41	0,00	6500,00	9500,00	4.000,00	27.580,00	34.276,00
6	Bantuan	0,00	0,00	7305,51	22161,32	0,00	17.693,95	0,00	0,00
7	APBD	81.412,20	220674,82	278137,64	359397,62	355832,04	396.943,24	598.875,68	694.420,00
8	Belanja Rutin	61.275,07	180070,27	229669,68	260029,86	298428,09	317.488,82	452.675,44	320.032,00

Sumber: WWW. Djpk.depkeu.go.id

Tabel 5. Tingkat Pertumbuhan PAD Kota Bandar Lampung 2000-2007

Tahun	PAD (Dlm juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Kategori Perubahan (%)	Kategori
2000	11.922,34	0,00		
2001	23.696,67	98,76	> 50,01	Sangat baik
2002	31.586,28	33,29	30,01 – 40,00	Sedang
2003	35.511,80	12,43	10,01 – 20,00	Kurang
2004	36.689,58	3,32	< 10,00	Sangat kurang
2005	46.073,50	25,58	20,01 – 30,00	Cukup
2006	48.397,04	5,04	< 10,00	Sangat Kurang
2007	49.796,00	2,89	< 10,00	Sangat Kurang
Rata-rata		22,66	20,01 – 30,00	Cukup

Sumber: Tabel 4

Tingkat Pertumbuhan PAD dan TPD

Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan daerah dari pertumbuhan nilai PAD melalui metode rata-rata. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel 5 di atas memperhatikan bahwa PAD Kota Bandar Lampung mengalami kecenderungan meningkat selama periode tahun 2000-2007. Pada Tahun 2001 pertumbuhan PAD Kota Bandar Lampung sebesar 98,76% yang dikategorikan *sangat baik*, akan tetapi pada tahun 2002 mengalami penurunan dimana pertumbuhannya hanya mencapai sebesar 33,29% dibanding dengan tahun sebelumnya, dan termasuk dalam kategori pertumbuhan *sedang*. Penurunan ini

disebabkan krisis ekonomi berkepanjangan sehingga kondisi keuangan perekonomian Indonesia yang kurang baik, dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa melambung tinggi yang akhirnya pendapatan daerah berkurang.

Selanjutnya pada tahun 2003-2004 pertumbuhan PAD terus mengalami penurunan dan hanya mencapai sebesar 3,32 %, tingkat pertumbuhan ini termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Pada tahun 2005 pertumbuhan PAD Kota Bandar Lampung mengalami sedikit peningkatan sehingga menjadi 25,58%, yang termasuk dalam kategori *cukup*. Namun pada tahun 2007 persentase pertumbuhan PAD kembali mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga menjadi 2,89%, dan termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Kondisi ini

menggambarkan masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah seperti: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan PAD yang berfluktuasi di atas, maka total penerimaan daerah juga cenderung akan mengalami hal yang sama, Perkembangan Total Penerimaan Daerah (TPD) Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2000 sampai dengan 2007 seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah Kota Bandar Lampung sudah mengalami peningkatan yang pesat. APBD dari tahun 2000 hingga tahun 2007 terus

miningkat. Berdasarkan kategori pertumbuhan yang ditetapkan Depdagri, maka selama kurun waktu 7 tahun terakhir termasuk dalam kategori *sedang*. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga pada tahun 2002 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar 28,03% dibanding dengan tahun 2001, dan ini termasuk dalam kategori pertumbuhan *cukup*.

Fluktuasi pertumbuhan yang terjadi selama 7 tahun terakhir dikarenakan adanya krisis ekonomi secara makro dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa melambung tinggi. Daya beli masyarakat relatif rendah yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi tidak seimbang hingga tahun 2004 keadaan belum pulih sepenuhnya.

Tabel 6 : Tingkat Pertumbuhan Total Penerimaan Daerah (TP PD) Kota Bandar Lampung Tahun 2000 – 2007

Tahun	TPPD (juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Kategori Pertumbuhan	Kategori TP PD
2000	83.828,27	0,00		
2001	231.198,87	175,80	> 50,01	Sangat baik
2002	296.008,08	28,03	20,01 – 30,00	Cukup
2003	369.344,39	24,78	20,01 – 30,00	Cukup
2004	368.985,45	(0,10)	< 10,00	Sangat kurang
2005	411.681,66	11,57	10,01 – 20,00	Kurang
2006	567.594,51	37,87	30,01 – 40,00	Sedang
2007	636.339,00	12,11	10,01 – 20,00	Kurang
Rata-rata		36,26	30,01 – 40,00	Sedang

Sumber: Tabel 4

Sehingga mengakibatkan Total Penerimaan Daerah (TPD) yaitu seluruh realisasi penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan, bantuan, penerimaan lain-lain dan pinjaman daerah menjadi menurun karena krisis ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Secara keseluruhan Kota Bandar Lampung telah mampu menambah penerimaan daerah dengan rata-rata 36,26% pertahun, dan secara rata-rata Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung termasuk dalam kategori *sedang*.

Derajat Otonomi Fiskal

Kesiapan dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari segi positif fiskal keuangan daerah di dalam memberikan andil dalam sisi penerimaan APBD. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung rasio PAD terhadap TPD pada tahun berjalan. Untuk menggambarkan tentang DOF Kota Bandar Lampung diketahui kecenderungan perubahan PAD

terhadap TPD. Dalam hal ini DOF akan menggambarkan besar kemampuan Kota Bandar Lampung dalam memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.

Tabel 7 menunjukkan pertumbuhan DOF pada tahun 2000 yaitu sebesar 14,22% yang termasuk dalam kategori *kurang*, dan pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi sebesar 10,25%, yang juga termasuk dalam kategori *kurang*. Hal itu terjadi karena peranan PAD sangat kecil, sementara TPD terus mengalami kenaikan untuk mengimbangi belanja daerah. Akan tetapi secara perlahan DOF pada tahun 2002 mengalami sedikit peningkatan sehingga menjadi 10,67% walaupun masih dalam kategori *kurang*. Pada tahun 2003-2004 persentase pertumbuhan DOF mengalami penurunan kembali menjadi pada tahun 2003 9,61% dan pada tahun 2004 9,94% dan keduanya masih dalam kategori *kurang*. Tahun 2005 kembali mengalami sedikit kenaikan sehingga persentase pertumbuhan DOF menjadi 11,91%, namun demikian juga masih termasuk dalam

kategori *kurang*. Tahun 2006 pertumbuhan DOF terus mengalami penurunan sehingga menjadi 8,53 % dan bahkan pada tahun 2007 persentase pertumbuhan DOF mengalami penurunan kembali sehingga menjadi 7,83%, Keduanya termasuk dalam kategori *kurang*.

Dampaknya bagi Kota Bandar Lampung jika di lihat secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki DOF dengan rata-rata 10,28% pertahun yang berarti Kota Bandar Lampung *kurang mampu* mengendalikan keuangan daerahnya sendiri.

Rasio Dana Alokasi Umum

Tingkat penyaluran dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada Kota Bandar Lampung menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah.

Pada Tabel 8 menunjukkan Kota Bandar Lampung telah berhasil mengalokasikan atau transfer dana dari pusat kepada daerah otonom dalam bentuk blok yang diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintahan. Itu terbukti RDAU pada tahun 2000 sebesar 54,86% hingga tahun 2007 meningkat sebesar 66,85%.

Tabel 7 : Tingkat Pertumbuhan DOF Kota Bandar Lampung Tahun 2000 – 2007

TAHUN	PAD	TDP	DOF (%)	Kategori perubahan	Kategori DOF
2000	11.922,34	83.828,27	14,22	10,01 – 20,00	Kurang
2001	23696,67	231198,87	10,25	10,01 – 20,00	Kurang
2002	31.586,28	296008,08	10,67	10,01 – 20,00	Kurang
2003	35511,80	369344,39	9,61	< 10,00	Sangat Kurang
2004	36689,58	368985,45	9,94	< 10,00	Sangat Kurang
2005	46.073,50	411.681,66	11,19	10,01 – 20,00	Kurang
2006	48.397,04	567.594,51	8,53	< 10,00	Sangat Kurang
2007	49.796,00	636.339,00	7,83	< 10,00	Sangat Kurang
Rata-rata			10,28	10,01 – 20,00	Kurang

Sumber: Tabel 4

Tabel 8 : Tingkat Pertumbuhan RDAU Kota Bandar Lampung tahun 2000 – 2007

TAHUN	DAU	APBD	RDAU (%)	Kategori Perubahan	Kategori RDU
2000	44.666,43	81.412,20	54,86	> 50,01	Sangat Kurang
2001	159.411,80	220.674,82	72,24	> 50,01	Sangat Kurang
2002	139.350,00	278.137,64	50,10	> 50,01	Sangat Kurang
2003	233.550,00	359.397,62	64,98	> 50,01	Sangat Kurang
2004	243.044,00	355.832,04	68,30	> 50,01	Sangat Kurang
2005	264.151,00	396.943,24	66,55	> 50,01	Sangat Kurang
2006	421.911,00	598.875,68	70,45	> 50,01	Sangat Kurang
2007	464.191,00	694.420,00	66,85	> 50,01	Sangat Kurang
Rata-rata			64,29	> 50,01	Sangat Kurang

Sumber: Tabel 4

Secara rinci tingkat pertumbuhan RDAU dapat digambarkan sebagai berikut : pada tahun 2000 pertumbuhan RDAU sebesar 54,86% dan termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Pada tahun 2001 pertumbuhan RDAU mengalami peningkatan sehingga menjadi 72,24% tetapi masih dalam kategori *sangat kurang*. Pada tahun 2002 pertumbuhan RDAU mengalami penurunan menjadi 50,10% dan masih dalam kategori yang *sangat kurang*.

Kemudian pada tahun 2003-2004 pertumbuhan RDAU sedikit mengalami kenaikan masing-masing pada tahun 2003 64,98% dengan kategori *sangat kurang* dan tahun 2004 68,30% dan masih dalam kategori *sangat kurang*. Pada tahun 2006 pertumbuhan RDAU kembali

mengalami kenaikan menjadi 70,45% tetapi masih dalam kategori *sangat kurang*. Selanjutnya pada tahun 2007 pertumbuhan RDAU kembali mengalami penurunan menjadi 66,85% dan dalam kategori *sangat kurang*. Jika dilihat secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kota Bandar Lampung telah mampu mengurangi penyaluran dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 64,29% pertahun.

Indeks Kemampuan Rutin

Untuk mengetahui keuangan daerah dapat menggunakan tolak ukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan Keuangan dalam potensi daerah Kota Bandar Lampung dalam membiayai belanja rutin.

Tabel 9 Tingkat pertumbuhan IKR Kota Bandar Lampung tahun 2000 – 2007

Tahun	PAD	DAU	Bagi Hasil BP	Rutin	IKR	Kategori Perubahan	Kategori IKR
2000	11.922,34	44.666,43	7.357,07	61.275,07	104,36	> 50,01	Sangat Baik
2001	23.696,67	159.411,80	13497,65	180.070,27	109,18	> 50,01	Sangat Baik
2002	31.586,28	139.350,00	16252,09	229.669,68	81,50	> 50,01	Sangat Baik
2003	35.511,80	233.550,00	16249,77	260.029,86	109,72	> 50,01	Sangat Baik
2004	36.689,58	243.044,00	0,00	298.428,09	93,74	> 50,01	Sangat Baik
2005	46.073,50	264.151,00	24.440,18	317.488,82	105,41	> 50,01	Sangat Baik
2006	48.397,04	421.911,00	36.148,47	452.675,44	111,88	> 50,01	Sangat Baik
2007	49.796,00	464.191,00	60.126,00	320.032,00	179,39	> 50,01	Sangat Baik
Rata-rata					111,90	> 50,01	Sangat Baik

Sumber: Tabel 4

Tabel 9 di atas menunjukkan Kota Bandar Lampung telah mampu menambah Indeks Kemampuan Rutin. Hal ini terbukti dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) pada tahun 2000 sebesar 104,36% hingga tahun 2007 meningkat sebesar 179,39%. Jika dilihat secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kota Bandar Lampung telah mampu membiayai belanja rutin sebesar 111,90% pertahun dengan kategori pertumbuhan *sangat baik*.

Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dan bantuan dari pemerintah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber daya dan potensi lokal yang terkandung di dalamnya.

Dari hasil analisis pada Tabel 10, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Rasio Ketergantungan Kota Bandar Lampung pada tahun 2000 sebesar 75,49% hingga tahun 2007 terus manerus mengalami penurunan sebesar 71,78%. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sudah dapat mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.

Jika melihat kecenderungan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Tabel 10: Tingkat pertumbuhan Rasio Ketergantungan Kota Bandar Lampung tahun 00–07

Thn	DAU	DAK	Bantuan	APBD	RK (%)	Kategori Pertumbuh	Kategori RK
2000	44.666,43	16.793,14	0.00	81.412,20	75.49	> 50,01	Sangat Kurang
2001	159.411,80	679,41	0.00	220.674,82	72.55	> 50,01	Sangat Kurang
2002	139.350,00	0.00	7.305,51	278.137,64	52.73	> 50,01	Sangat Kurang
2003	233.550,00	6.500,00	22.161,32	359.397,62	72.96	> 50,01	Sangat Kurang
2004	243.044,00	9.500,00	0.00	355.832,04	70.97	> 50,01	Sangat Kurang
2005	264.151,00	4.000,00	17.693,95	396.943,24	72.01	> 50,01	Sangat Kurang
2006	421.911,00	27.580,00	0.00	598.875,68	75.06	> 50,01	Sangat Kurang
2007	464.191,00	34.276,00	0.00	694.420,00	71.78	> 50,01	Sangat Kurang
		Rata-rata			70.44	> 50,01	Sangat Kurang

Sumber: Tabel 4

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung pada tahun 2000 – 2007 menunjukkan kecenderungan meningkat, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan PAD Kota Bandar Lampung setiap tahun relatif cukup baik sebesar 22,66 %, dengan kategori *cukup*.

Dilihat dari perkembangan Total Penerimaan Daerah (TPD) Kota Bandar Lampung tahun 2001 sebesar 175,80 %, akan tetapi sampai tahun 2004 masih terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai mines 0,10% ,

Namun demikian secara keseluruhan realisasi total penerimaan daerah Kota Bandar Lampung telah mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah dengan rata-rata sebesar 36,26 % pertahunnya selama periode 8 tahun terakhir, dan termasuk dalam kategori *sedang* .

Ditinjau dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Bandar Lampung pada tahun 2000-2007 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 10,28 %, sehingga dapat dinyatakan dalam kategori *kurang*. Hal ini terjadi karena peranan PAD yang sangat kecil atau tidak proporsional dengan TPD yang terus meningkat.

Di lihat dari Tingkat Rasio Dana alokasi Umum (RDAU) yang

diterima Kota Bandar Lampung tahun 2000-2007 menggambarkan bahwa Kota Bandar Lampung telah berhasil atau transfer dana dari pusat kepada daerah otonom dalam bentuk blok yang diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintahan. Jika dilihat secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kota Bandar Lampung telah mampu mengurangi penyaluran dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan rata-rata 64,29 % pertahun. Namun demikian pengurangan penyaluran bantuan pusat ini masih termasuk dalam kategori *sangat kurang*

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Bandar Lampung sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 179,39 %. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah mampu membiayai belanja rutin dengan baik, atau secara keseluruhan termasuk dalam kategori *sangat baik*

Rasio Ketergantungan Kota Bandar Lampung tahun 2000-2007 semakin menurun, walaupun secara keseluruhan mempunyai nilai rata-rata yang relatif tinggi sebesar 71,78 % pertahunnya, yang berarti pemerintah daerah Kota

Bandar Lampung dalam mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Berdasarkan nilai rata-rata di atas maka pemerintah daerah masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk memperkecil tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang lebih intensif melalui penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bandar Lampung agar mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dan TPD pada tahun anggaran yang akan datang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membuka peluang usaha dan investasi yang sebesar-besarnya pada sektor potensial, seperti industri, perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini mengingat bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah harus mempunyai dana yang cukup

besar dan terus menerus ditingkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dicapai melalui penggalan sumber-sumber PAD, seperti pajak, retribusi, dan sumber-sumber lain yang sah. Diharapkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD dapat mengurangi ketergantungan dengan subsidi pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal, "Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, Nyata dan Bertanggung Jawab", Prisma, Vol XII, No.3.
- Binder, Brian, B.J., 1984, *Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. XXXII, No.2.13-25.
- Cahyo, W. Darmam (2000), *Upaya Mengurangi Ketimpangan Fiskal Antar Daerah*, Karya Tulis Ilmiah (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Darumurti, K.D., dan Rauta, Umu, 2000, "Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini dan Esok", *Kritis*, Vol XII, No.3.
- Insukiro, dkk, 1994, "Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", Laporan Penelitian, FE-UGM, Yogyakarta.
- Jamil, Ahmad, *Menggali Potensi Otonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, UII, Yogyakarta.
- Kaho, Josep, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Muhadrajad, 1995, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", Prisma,
- Otonomi daerah (undang-undang No. 32 dan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005) dan pilkada, Penerbit Lima Bintang, Surabaya.
- Mamesah, DJ., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Madiasmu, 2000, "Pradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah", Yogyakarta.
- Mudjarad Kuncoro, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan* Prisma, april 2005.
- Pamuji, S., 1982, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan*, Penerbit Iktiar Baru, Jakarta.

- Siti, Aminah (2002), *Kemampuan Keuangan Daerah Sekayu Kabupaten Sumara Selatan dalam Mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fakultas Ekonomi, Uniersias Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Syamsi,Ibnu, 1986, *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Utomo, Warsito, 2000," *Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Implikasi Otonomi*", Yogyakarta.
- Winarni, *Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksnaan Otonomi daerah*,
- Widodo, 1990, *Indikator Ekonomi sebagai Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta

